

BAB V **KESIMPULAN**

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Mahasiswa (PPM) Khoirul Huda 2 Surabaya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

PPM KH 2 Surabaya memiliki struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan berfungsi mendukung kelancaran kegiatan pondok. Ketua Pondok berperan dalam arah kebijakan dan pengawasan umum, Ketua Santri sebagai penghubung antara santri dan pengurus pondok, sedangkan Bendahara berperan penting dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Pembagian tugas yang jelas antar ketiganya mencerminkan tata kelola organisasi yang tertib dan efektif.

2. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan PPM KH 2 bersumber dari iuran santri, *sodaqoh*, donasi wali santri, alumni, serta program usaha bersama. Dana dikelola secara internal dan dibagi ke dalam beberapa pos anggaran seperti kas umum, dana konsumsi, *infaq*, uang kamar, dan lain-lain. Proses pencatatan dilakukan menggunakan *spreadsheet*, yang menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya pencatatan yang tertib meskipun dengan sistem sederhana.

3. Strategi Transparansi

PPM KH 2 menerapkan prinsip transparansi melalui beberapa mekanisme, seperti musyawarah bulanan, laporan keuangan rutin (RAB dan LPJ), penyampaian laporan kepada yayasan setiap tiga bulan, serta pertemuan tahunan dengan wali santri (perwalian). Selain itu, media sosial seperti Instagram juga digunakan untuk menyampaikan informasi kegiatan kepada publik. Meskipun belum memiliki website resmi, bentuk transparansi tetap dijaga melalui komunikasi terbuka dan sistem pelaporan internal.

4. Strategi Akuntabilitas

Strategi akuntabilitas di PPM KH 2 Surabaya tercermin dalam lima aspek utama. Pada aspek akuntabilitas hukum dan kejujuran, pondok telah memiliki legalitas formal yang sah di bawah naungan yayasan berbadan hukum, serta menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam pengelolaan amanah, baik secara administratif maupun sosial.

Dalam dimensi akuntabilitas manajerial, struktur organisasi yang terbagi antara pengurus pondok dan pengurus santri menunjukkan sistem koordinasi yang rapi dan kolektif, dengan pelaksanaan musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan. Selanjutnya, akuntabilitas program diterapkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang melibatkan seluruh tim dan disesuaikan dengan kebutuhan pondok maupun lingkungan sekitar.

Di sisi lain, akuntabilitas kebijakan tercermin dari kebijakan internal yang disusun secara musyawarah, termasuk dalam hal penjadwalan piket, pengajuan dana kegiatan, serta sistem evaluasi. Sementara itu, akuntabilitas finansial menjadi aspek paling menonjol, dengan pencatatan kas berbasis *spreadsheet*, pembagian pos dana secara rinci, serta mekanisme pertanggungjawaban melalui RAB dan LPJ yang dibahas dalam forum rutin. Secara keseluruhan, strategi akuntabilitas PPM KH 2 tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi berakar kuat pada budaya kolektif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai keislaman serta tanggung jawab sosial yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh elemen pondok.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PPM KH 2 Kota Surabaya

PPM KH 2 disarankan untuk meningkatkan sistem pencatatan keuangan dengan menggunakan model yang lebih baku, seperti aplikasi akuntansi sederhana, serta menyusun pedoman tertulis terkait sistem informasi dan transparansi guna menstandarkan alur komunikasi dan pelaporan. Selain itu, pengembangan media publikasi seperti website resmi juga penting agar informasi pondok lebih mudah diakses oleh masyarakat, calon santri, dan donatur.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk dilakukan secara komparatif di beberapa pondok pesantren atau lembaga nirlaba serupa guna memperoleh gambaran yang lebih luas, serta melibatkan informan tambahan seperti santri, pengajar, wali santri, dan pengurus yayasan agar pemahaman yang diperoleh lebih menyeluruh.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran pengelolaan keuangan berbasis transparansi dan akuntabilitas, khususnya bagi mahasiswa di bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi sektor publik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan di satu lokasi, yaitu PPM Khoirul Huda 2 Surabaya, sehingga hasilnya bersifat kontekstual dan belum dapat digeneralisasi ke pondok pesantren lainnya. Kedua, informan terbatas pada lima orang inti (Ketua Pondok, Ketua Santri Laki-laki dan Ketua Santri Perempuan, Bendahara, serta Alumni), sehingga ragam perspektif yang tergali masih terbatas, terutama dari pihak eksternal. Ketiga, pendekatan kualitatif fenomenologis yang digunakan menghasilkan temuan yang bersifat subjektif dan interpretatif, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam menarik

kesimpulan yang lebih luas.

Selain itu, keterbatasan juga terdapat ada aspek teoritis. Penelitian ini lebih berfokus pada stakeholder internal dan menggunakan teori stakeholder yang dikombinasikan dengan teori keagenan sebagai landasan analisis. Namun, belum menjangkau keterlibatan stakeholder eksternal seperti masyarakat, donatur, atau pemerintah secara eksplisit, padahal keberadaan mereka juga penting dalam membentuk praktik transparansi dan akuntabilitas pondok pesantren. Hal ini membuka peluang kajian lebih lanjut dengan memperluas cakupan teori dan partisipan penelitian.